



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Implementasi *Evangelii Gaudium* dalam Kebijakan Luar
Negeri Tahta Suci Vatikan pada Konflik Suriah**

Skripsi

Oleh

Fabiola Chandra Widianindya

2014330053

Bandung

2018

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Fabiola C. Widianindya
Nomor Pokok : 2014330053
Judul : Implementasi *Evangelii Gaudium* dalam Kebijakan Luar Negeri
Tahta Suci Vatikan pada Konflik Suriah

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Senin, 4 Juni 2018
Dan dinyatakan **LULUS** .

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A. :

Sekretaris

Dr. Paulus Yohanes Nur Indro :

Anggota

Idil Syawfi, S.IP., M.Si. :

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fabiola Chandra Widianindya

NPM : 2014330053

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Implementasi *Evangelii Gaudium* dalam Kebijakan Luar Negeri
Tahta Suci Vatikan pada Konflik Suriah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 4 Juni 2018



Fabiola Chandra Widianindya

ABSTRAK

Nama : Fabiola Chandra Widianindya

NPM : 2014330053

Judul : Implementasi *Evangelii Gaudium* dalam Kebijakan Luar Negeri Tahta Suci Vatikan pada konflik Suriah

Penelitian ini akan mendeskripsikan implementasi *Evangelii Gaudium* di dalam kebijakan luar negeri Tahta Suci Vatikan pada konflik Suriah. Vatikan merupakan negara terkecil di dunia yang memiliki pengaruh besar di dalam politik internasional sejak berabad-abad lalu. Saat ini, Tahta Suci Vatikan sebagai bagian dari politik internasional dihadapkan pada permasalahan konflik Suriah. Konflik internal Suriah yang berkepanjangan membuatnya menjadi masalah internasional dengan adanya dampak yang diberikan, baik dari konflik yang menyebar hingga warga yang terdampak. Menghadapi masalah tersebut,

Sesuai dengan pengertian kebijakan luar negeri serta pandangan Robert Keohane dalam *Ideas & Foreign Policy*, kebijakan luar negeri Tahta Suci Vatikan pada konflik Suriah dipengaruhi oleh faktor sistem internasional yang terbentuk akibat konflik Suriah serta oleh persepsi dan nilai-nilai yang dipegang oleh pemimpin Tahta Suci, yaitu nilai-nilai pada *Evangelii Gaudium*, tentang masalah tersebut serta melihat kapabilitas yang dimiliki negara Vatikan dalam menjalankan kebijakan luar negerinya

Temuan yang dihasilkan pada penelitian ini adalah *Evangelii Gaudium* menjadi pedoman bagi pembuatan kebijakan luar negeri Tahta Suci Vatikan yang mempengaruhi interaksi strategis dengan negara dan aktor lain pada konflik Suriah. Nilai-nilai yang terdapat pada *Evangelii Gaudium* terwujud dalam dua kebijakan yaitu melakukan promosi perdamaian di Suriah dan memberikan bantuan kemanusiaan bagi para korban. Tahta Suci menggunakan instrumen diplomasi dan proganda untuk merangkul seluruh komunitas internasional, baik dari negara, kelompok masyarakat, hingga individu, sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan luar negeri.

Kata kunci: Tahta Suci, Vatikan, Konflik Suriah, Ide, Kebijakan Luar Negeri, *Evangelii Gaudium*

ABSTRACT

Name : Fabiola Chandra Widianindya

NPM : 2014330053

Title : Implementation of *Evangelii Gaudium* in Holy See's Foreign Policies toward Syrian Conflict

This research is going to describe the implementation of *Evangelii Gaudium* in Holy See's foreign policies toward Syrian Conflict. Vatican is the smallest sovereign city-state in the international politics. However, Vatican, or also named Holy See, holds a great influence in the international political sphere. Today, Holy See as a part of international politics faces great global problems of the rising of internal conflict. Syrian Conflict is among those global problems. Holy See takes several measures as foreign policies toward Syrian Conflict based on the values written in the *Evangelii Gaudium*. Those values are manifested in two main foreign policies, which are promoting peace toward Syria and giving humanitarian assistance to the victims of Syrian crisis.

Based on the term of foreign policy and the perspective from Robert Keohane in *Ideas & Foreign Policy*, Holy See's foreign policies toward Syrian Crisis is affected by the structure of international politics that is shaped by the Syrian conflict and also by the perspective and values of the political leader of the Holy See towards the ideal state of international politics.

The finding of this research is *Evangelii Gaudium* is a foundation to the Holy See's foreign policies toward Syrian Crisis that affected the strategic interaction of the Holy See with other states and international actors on the Syrian crises. Those values are manifested in two main foreign policies, which are promoting peace toward Syria and giving humanitarian assistance to the victims of Syrian crisis. Holy See uses diplomacy and propaganda as the instruments to implement her foreign policies, to aim the active participation of all the international community; from state level, community groups, to individual level.

Keywords: Holy See, Vatican, Syrian Conflict, Ideas, Foreign Policies, *Evangelii Gaudium*

KATA PENGANTAR

Implementasi *Evangelii Gaudium* dalam kebijakan luar negeri Tahta Suci Vatikan pada konflik Suriah merupakan sebuah penelitian yang terilhami oleh penderitaan yang dialami dunia global pada umumnya dan para korban pada khususnya akibat konflik Suriah. Tahta Suci Vatikan merupakan salah satu aktor penting di dalam politik internasional yang kadang terlupakan ditengah-tengah dinamika politik internasional yang ditentukan oleh kekuatan fisik negara, salah satunya tercermin pada kasus ini. Selain sebagai pemenuhan syarat kelulusan strata satu, penulis berharap dengan adanya penelitian ini pembaca dapat melihat sisi lain politik internasional dan kembali memasukkan nilai-nilai ke dalam setiap fakta yang terjadi.

Penulis mengucapkan rasa syukur yang paling tinggi kepada Tuhan atas segala rencana dan berkat yang diberikan untuk menyelesaikan penelitian Implementasi *Evangelii Gaudium* dalam kebijakan luar negeri Tahta Suci Vatikan pada konflik Suriah. Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih pula kepada Dr. Paulus Yohanes Nur Indro selaku dosen pembimbing yang telah membantu penulis menyelesaikan seluruh rangkaian penelitian ini. Penelitian ini merupakan bagian dari pembelajaran secara akademis dan non-akademis, sehingga penulis menyadari bahwa masih terdapat berbagai kesalahan di dalam penelitian ini dan juga di dalam prosesnya. Maka, penulis menerima dengan terbuka segala saran dan kritik yang membangun bagi penelitian ini serta bagi pribadi penulis.

Bandung, 17 Mei 2018

Fabiola C. Widianindya

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GRAFIK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.2.1. Deskripsi Masalah.....	5
1.2.2. Pembatasan Masalah.....	8
1.2.3. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1.3.1. Tujuan Penelitian	9
1.3.2. Kegunaan Penelitian	9
1.4. Literature Review.....	9
1.5. Kerangka Pemikiran.....	13
1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	22
1.6.1. Metode dan Jenis Penelitian	22
1.6.2. Teknik Pengumpulan Data	23
1.7. Sistematika Penelitian	23
BAB II DIMENSI INTERNASIONAL KONFLIK SURIAH	25
2.1. Kondisi Umum Suriah Sebelum Konflik	25
2.1.1. Suriah di Bawah Kepemimpinan Rezim Assad.....	25
2.1.2. Kelompok Masyarakat Suriah	26

2.1.3. Reformasi Ekonomi Suriah	29
2.1.4. Dinasti al-Assad dalam Pemerintahan Suriah	31
2.1.5. Hubungan Suriah dengan Negara Tetangga	33
2.2. Dimensi Internasional Konflik Suriah	36
2.2.1. Pengaruh Konflik Internal di Kawasan Timur Tengah	36
2.2.2. Konflik Suriah sebagai Sumber Krisis Kemanusiaan	37
2.2.3. Penyebaran Krisis Kemanusiaan Suriah	39
2.2.4. Campur Tangan Dunia Internasional dalam Konflik Suriah	41
2.2.5. Upaya Perdamaian bagi Suriah.....	44
BAB III TAHTA SUCI VATIKAN DALAM DUNIA INTERNASIONAL	49
3.1. Vatikan sebagai Negara dan Tahta Suci.....	49
3.1.1. Vatikan Sebagai Negara-Kota	50
3.1.2. Vatikan sebagai Tahta Suci	53
3.2. Paus Fransiskus sebagai Pemimpin Agama dan Tahta Suci	54
3.3. Kepentingan Nasional Tahta Suci.....	56
3.4. Pandangan Dasar Gereja Katolik sebagai Dasar Kebijakan Tahta Suci	59
3.5. Peran Tahta Suci di Dunia Internasional.....	66
3.6. <i>Evangelii Gaudium</i> sebagai Dasar Politik Luar Negeri	70
BAB IV IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI TAHTA SUCI	
DALAM KONFLIK SURIAH.....	74
4.1. Kebijakan Luar Negeri Tahta Suci dalam Konflik Suriah	74
4.2. Implementasi Kebijakan Luar Negeri Tahta Suci dalam Menemukan Solusi	
Politik Konflik Suriah	79
4.2.1. Situasi Politik Internasional di dalam Konflik Suriah	79
4.2.2. Kunjungan Kenegaraan Tahta Suci	84
4.2.3. Partisipasi Tahta Suci di dalam Konferensi Internasional.....	88

4.3.Implementasi Kebijakan Luar Negeri Tahta Suci dalam Mengatasi Krisis	
Kemanusiaan Suriah.....	95
4.3.1. Tindakan Nyata Tahta Suci bagi Korban Krisis Suriah	98
4.3.2. Upaya Tahta Suci dalam Mengumpulkan Partisipasi Komunitas	
Internasional	102
4.3.3. Dialog antar-Agama dalam Mengatasi Konflik Suriah.....	104
BAB V KESIMPULAN.....	107
DAFTAR PUSTAKA	113

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 : Efek Krisis Finansial Global Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Suriah	36
Grafik 2.2 : Perubahan Rasio Kemiskinan dan Pengangguran di Suriah pada tahun 1997-2007.....	37
Grafik 2.3 : Jumlah Pengungsi Suriah hingga tahun 2017.....	45
Grafik 4.1 : Pemetaan Negara Pendukung dan Negara Penolak Intervensi Militer bagi Konflik Suriah.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.8. Latar Belakang Masalah

Konflik yang terjadi di negara Suriah merupakan akumulasi dari berbagai jenis konflik yang terjadi baik di dalam maupun di luar negara tersebut. Beberapa konflik yang terjadi di negara Suriah meliputi perang sipil, konflik etnis Kurdi, keberadaan ISIS, dan masuknya intervensi negara lain.¹

Terjadinya perang sipil antara pemerintahan Bashar al-Assad dengan rakyat yang mengoposisi pemerintahannya. Perang sipil di Suriah berawal dari peristiwa *Arab Spring* pada tahun 2011, di mana seperti kebanyakan negara Timur Tengah lainnya, rakyat Suriah melakukan gerakan damai untuk memprotes rezim Presiden Suriah, Bashar al-Assad. Namun gerakan damai tersebut ditanggapi melalui penggunaan kekerasan oleh militer Suriah. Pada akhirnya, rakyat Suriah mengubah gerakan damai menjadi sebuah konflik bersenjata. Alasan yang mendasari keputusan Assad untuk menindak gerakan damai dengan menggunakan kekuatan militer adalah karena Assad menyadari bahwa pemerintahannya lemah dan memiliki kemungkinan yang tinggi untuk mengalami kudeta. Maka satu-satunya jalan untuk mempertahankan rezimnya adalah melalui cara kekerasan seperti penggunaan senjata kimia, bom, dan kelaparan.

¹ Max Fisher, "How's Syria Civil War Evolved and Why It's So Complex," New York Times, 21 September 2016.

Upaya disintegrasi dan pernyataan merdeka dari etnis Kurdi di utara Suriah juga menjadi konflik yang dihadapi pemerintah Suriah. Walaupun Assad tidak berusaha untuk menindas etnis Kurdi, namun upaya yang dilakukan etnis Kurdi menarik keterlibatan negara Turki yang bertentangan dengan kelompok etnis Kurdi. Kelompok yang telah berjuang untuk mendapat pengakuan sebagai negara merdeka ini sendiri mengalami konflik secara horizontal dan vertikal; baik di dalam kelompok Etnis Kurdi sendiri dan juga konflik dengan negara-negara lain².

Konflik selanjutnya yang memperparah kondisi di Suriah adalah masuknya kelompok *Islamic State* ke dalam negara Suriah. Kelompok yang lebih sering disebut dengan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) tersebut memanfaatkan momentum perang sipil yang terjadi di Suriah. ISIS masuk ke wilayah Suriah diawali oleh pengiriman *top officer* ISIS oleh pemimpin ISIS, Baghdadi, ke negara Suriah dengan tujuan untuk mengajak salah satu kelompok oposisi pemerintahan Assad yang bernama *Nusra Front*³ untuk bersama melakukan jihad melawan al-Qaeda yang ada di Suriah.

Ketiga bentuk konflik tersebut menarik perhatian dunia internasional, dimana terdapat beberapa negara yang campur tangan dalam konflik tersebut dengan membawa kepentingan nasional masing-masing negara. Negara-negara yang mengintervensi konflik di Suriah adalah Iran, Saudi Arabia, Amerika Serikat, Turki, serta Rusia. Posisi negara Iran dalam konflik Suriah adalah

² Beverly Milton-Edward & Peter Hinchcliffe, *Conflict in the Middle East since 1945*, Routledge, 2002, hlm 67

³ Nusra Front atau juga yang disebut Jabhat Al-Nusra adalah kelompok jihadis asal Suriah yang juga merupakan kelompok oposisi rezim Assad. Tujuan yang dimiliki kelompok ini adalah untuk mendirikan negara Islam (Islamic State) di Suriah. *Jabhat al-Nusra: A Strategic Briefing*. Noman Benotman & Roisin Blake

mendukung rezim Assad. Iran melihat Suriah sebagai negara yang strategis, dimana Suriah dapat menjadi jalan masuk bagi Iran menuju Lebanon dan Hisbullah. Bagi Iran, Lebanon dan Hisbullah merupakan kunci penyeimbang kekuatan terhadap Israel yang kini memiliki senjata nuklir. Bertolak belakang dengan Iran, Saudi Arabia mendukung kelompok oposisi, atau ingin menjatuhkan rezim Assad. Alasan utama dari tindakan Arab Saudi adalah karena Arab Saudi dengan Iran telah memiliki sejarah rivalitas yang panjang. Dengan harapan untuk menjatuhkan rezim Assad, Arab Saudi juga berharap dapat melemahkan kekuatan Iran di kawasan Timur Tengah. Amerika Serikat sebagai negara adidaya masuk ke dalam konflik Suriah dengan posisi mendukung kelompok oposisi, atau sejalan dengan Arab Saudi. Tujuan campur tangan Amerika Serikat adalah untuk menjatuhkan rezim Assad, dimana Amerika Serikat telah memiliki sejarah rivalitas dengan rezim Assad. Selain itu, campur tangan Amerika Serikat di dalam konflik Suriah juga berupa pemberian dukungan kepada etnis Kurdi dengan memberi pasokan senjata kepada kelompok tersebut. Tujuan dari tindakan Amerika Serikat tersebut adalah harapan bahwa etnis Kurdi dapat melawan kelompok ISIS yang berada di Suriah. Posisi Turki di dalam konflik Suriah tidak dapat dipastikan mendukung atau menolak rezim Assad. Alasan utama dari campurtangan Turki adalah untuk mencegah pergerakan Kurdi agar tidak masuk ke wilayah Turki. Namun, Turki juga memberikan perlindungan bagi pemberontak Suriah dengan harapan mereka dapat menurunkan Assad dari kursi kepemimpinan. Rusia menjadi sekutu terbesar bagi rezim Assad. Dukungan yang diberikan Rusia kepada rezim Assad adalah karena Rusia memiliki pangkalan

militer di Suriah, satu-satunya pangkalan militer Rusia yang berada diluar wilayah Soviet.⁴

Konflik yang telah berlangsung sejak 2011 ini menimbulkan dampak yang sangat mempengaruhi dunia internasional. Hingga Maret 2017, konflik Suriah telah memunculkan lebih dari 500.000 korban jiwa, menyebabkan setengah dari populasi Suriah terlantar, munculnya krisis kemanusiaan, hingga tercaploknya sebagian wilayah Suriah oleh kelompok ISIS.⁵

Terdapat lebih dari 5 juta warga Suriah yang keluar dari negara Suriah untuk mencari suaka di negara lain. Besarnya angka pergerakan manusia tersebut menimbulkan implikasi besar bagi dunia internasional. Dunia internasional menyoroti terjadinya krisis kemanusiaan, dimana banyak pengungsi yang mengalami malnutrisi karena kurangnya asupan makanan yang didapatkan selama perjalanan mencari suaka serta terbatasnya makanan di pengungsian. Masalah kemanusiaan juga menimpa anak-anak, dimana mereka tidak mendapatkan pendidikan yang cukup selama mereka menjadi pengungsi. Krisis kemanusiaan yang paling besar adalah banyaknya warga Suriah yang tidak berhasil mencari suaka karena meninggal dalam perjalanan.⁶

Tidak hanya menjadi permasalahan bagi negara Suriah, dampak yang ditimbulkan besarnya pengungsi Suriah memunculkan potensi krisis bagi negara yang menjadi suaka. Banyaknya pengungsi di negara suaka berarti negara tersebut

⁴Max Fisher, *ibid.*

⁵ Dylan Collins, "Syria War: Worst Man-Made Disaster Since World War II," *Al Jazeera*, 15 Maret 2017, diakses pada 26 Agustus 2017 <http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/03/syria-war-worst-man-disaster-world-war-ii-170315054907704.html>

⁶ Max Fisher, *ibid.*

harus menanggung banyak sumber daya manusia baru namun tidak diimbangi dengan lapangan kerja yang ada sehingga akan muncul banyak pengangguran. Tanpa adanya pekerjaan, para pengungsi tidak mampu membiayai kebutuhan mereka, bahkan negara pun tidak dapat terus menerus membiayai kebutuhan pengungsi. Secara tidak langsung, tidak terpenuhinya kebutuhan pengungsi dapat memicu terjadinya tindakan-tindakan kriminalitas, seperti pencurian dan penjarahan. Potensi krisis yang lebih besar adalah bila masuknya gelombang pengungsi ditunggangi oleh teroris-teroris yang ingin berjihad di negara lain.⁷

Negara-negara Eropa merupakan negara yang paling banyak menjadi tujuan para pengungsi mencari suaka. Besarnya jumlah pengungsi yang datang ke benua Eropa memunculkan masalah tersendiri bagi politik di Eropa, terutama bagi organisasi Uni Eropa. Tidak seluruh negara yang menjadi anggota Uni Eropa terbuka dengan masuknya pengungsi ke negara mereka. Seringkali terjadi perdebatan di antara negara anggota Uni Eropa terkait dengan kebijakan yang sebaiknya diambil dalam menangani pengungsi, apakah sebaiknya Uni Eropa mengutamakan kondisi ekonomi dan keamanan masing-masing negara atau harus mengutamakan aspek kemanusiaan dari peristiwa tersebut.⁸

1.9. Identifikasi Masalah

1.9.1. Deskripsi Masalah

Saat ini, Tahta Suci Vatikan berada pada kepemimpinan Paus Fransiskus sejak 2013. Sejak awal masa kepemimpinannya, Paus Fransiskus telah dikatakan

⁷ Max Fisher, *ibid.*

⁸ Max Fisher, *ibid.*

sebagai tokoh penting bukan hanya di dalam Gereja Katolik tetapi juga bagi politik internasional.⁹ Pada masa kepemimpinannya, Paus Fransiskus dihadapkan pada banyak masalah internasional, seperti masalah kemiskinan, lingkungan, imigrasi, dan perang¹⁰. Timur Tengah menjadi kawasan dengan tingkat konflik yang tinggi, baik konflik intra-negara, antar negara, maupun antar kelompok masyarakat. Walaupun konflik yang terjadi di Timur Tengah dialami oleh sebagian besar negara di kawasan tersebut, Suriah menjadi negara yang memiliki kompleksitas konflik yang sangat tinggi. Seperti dikatakan oleh Kepala *United Nation Human Rights*, Zeid Ra'ad al-Hussein, perang yang terjadi di Suriah merupakan bencana terbesar yang berasal dari manusia setelah Perang Dunia II¹¹.

Sudah banyak upaya yang dilakukan oleh aktor internasional untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Suriah, baik dari konflik hingga dampaknya. Salah satu aktor yang telah berkontribusi dalam upaya damai adalah organisasi Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) melalui Kofi Annan dan Lakhdar Brahimi yang dilakukan pada tahun 2012. Pada mediasi yang dilakukan secara terpisah, kedua tokoh ini gagal untuk mewujudkan upaya damai pada konflik Suriah.¹²

Dalam laporan *International Peace Institute* pada tahun 2016, kegagalan dari Annan dan Brahimi dalam menjadi mediator upaya damai pada konflik Suriah disebabkan karena beberapa faktor. Dalam misi dan mandat yang dibawa

⁹ Christian, *Microstate* hlm 1

¹⁰ John L. Allen Jr, *The Francis Miracle: Inside the Transformation of the Pope and the Church*, (New York: Time Books, 2015), hlm 78

¹¹ Dylan Collins, "Syria war: 'Worst man-made disaster since World War II'," *Al Jazeera*, 15 Maret 2017,

¹² Raymond Hinnebusch, I. William Zartman, et al., *UN Mediation in Syrian Crisis: From Kofi Annan to Lakhdar Brahimi*, International Peace Institute, 2016

pada proses mediasi tersebut, terjadi ketidakjelasan akan mandat yang dibawa, sehingga tujuan mediasi tidak tersampaikan secara jelas. Kedua mediator yang memiliki posisi sebagai perwakilan dari PBB dan juga satu suara dengan Liga Arab yang anti-Assad sulit untuk diterima oleh kelompok pro-Assad. Dalam mediasi keduanya pula berfokus pada pelaksanaan gencatan senjata namun tidak diiring dengan upaya resolusi konflik lanjutan. Kedua mediator terlalu mengandalkan kekuatan besar untuk menyelesaikan konflik di Suriah, namun dari pihak Suriah sendiri tidak menganggap bahwa kunci penyelesaiannya adalah melalui intervensi kekuatan besar.¹³

Dengan membawa kebijakan luar negeri yang berdasarkan pada spiritualitas Gereja Katolik, yaitu *Evangelii Gaudium*, dan bukan untuk memperoleh kekuatan politik di dalam dunia internasional, Tahta Suci Vatikan, yang saat ini dijabat oleh Paus Fransiskus, turut serta berupaya untuk mewujudkan kondisi damai di Suriah. Sejak awal pengukuhanannya menjadi pemimpin Tahta Suci hingga saat ini, Paus Fransiskus telah secara aktif berupaya menurunkan ketegangan konflik di Suriah¹⁴.

Dalam penelitian ini, penulis ingin mendeskripsikan implementasi *Evangelii Gaudium* dalam kebijakan luar negeri Tahta Suci Vatikan pada konflik Suriah di masa kepemimpinan Paus Fransiskus, tepatnya pada periode waktu 2013-2017.

¹³ Raymond Hinnebusch, Ibid.

¹⁴ John L Allen, ibid.

1.9.2. Pembatasan Masalah

Penelitian implementasi *Evangelii Gaudium* dalam kebijakan luar negeri Tahta Suci Vatikan dalam konflik Suriah memiliki fokus pada pembahasan segala tindakan atau aksi resmi yang dilakukan oleh Tahta Suci Vatikan pada tahun 2013-2017 terhadap konflik Suriah. Tindakan atau aksi resmi yang akan dianalisa pada penelitian ini dapat berupa surat atau pesan resmi yang dikeluarkan oleh Tahta Suci Vatikan di bawah kepemimpinan Paus Fransiskus, ataupun berupa kunjungan kenegaraan Tahta Suci ke negara-negara yang memiliki keterkaitan dengan berlangsungnya konflik Suriah.

Tahun 2013-2017 dipilih sebagai batasan waktu yang akan dibahas di dalam penelitian ini karena tahun 2013 merupakan awal masa kepemimpinan Tahta Suci yang baru yaitu Paus Fransiskus. Dalam jangka waktu 5 tahun, Tahta Suci Vatikan telah melakukan serangkaian kebijakan luar negeri dalam rangka menghadapi isu konflik Suriah, sehingga jangka waktu 2013-2017 menjadi waktu pembatas masalah yang akan dibahas.

1.9.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan masalah yang telah ditulis diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji di dalam penelitian ini sebagai berikut :

Bagaimana implementasi Evangelii Gaudium dalam kebijakan luar negeri yang dilakukan Tahta Suci Vatikan pada konflik Suriah pada tahun 2013-2017?

1.10. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.10.1. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mendeskripsikan implementasi *Evangelii Gaudium* dalam kebijakan luar negeri yang dilakukan Tahta Suci Vatikan pada konflik Suriah di tahun 2013-2017.

1.10.2. Kegunaan Penelitian

Penelitian Implementasi *Evangelii Gaudium* dalam Kebijakan Luar Negeri Tahta Suci Vatikan pada Konflik Suriah memiliki kegunaan sebagai tambahan referensi bagi para akademisi ilmu hubungan internasional, terutama yang berfokus pada bidang kebijakan luar negeri. Secara umum pula, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang negara Vatikan dan dinamika politiknya.

1.11. Literature Review

Dalam menyusun penelitian ini, penulis mengambil beberapa literatur yang dinilai dapat mendukung hasil penelitian yaitu *U.N. Mediation in the Syrian Crisis: From Kofi Annan to Lakhdar Brahimi* dan *Holy See and International Conflict and Peacekeeping*.

Literatur pertama yang digunakan penulis adalah hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh Raymond Hinnebusch dan I. William Zartman bersama dengan Elizabeth Parker-Magyar dan Omar Imady sebagai laporan bagi *International Peace Institute*. Penelitian yang berjudul *U.N. Mediation in the*

Syrian Crisis: From Kofi Annan to Lakhdar Brahimi merupakan sebuah tulisan yang berisi tentang upaya dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Kofi Annan dan Lakhdar Brahimi sebagai perwakilan dari organisasi Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) untuk melakukan mediasi terhadap perwujudan upaya damai di Suriah. Di dalam penelitian ini, dipaparkan secara rinci misi, mandat, dan strategi yang dilakukan oleh kedua tokoh. Penelitian ini juga menjelaskan kesalahan yang dilakukan oleh Annan dan Brahimi dalam melakukan proses mediasi sehingga upaya keduanya gagal untuk mewujudkan perdamaian di Suriah.¹⁵ Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu penelitian yang sangat komprehensif karena tidak hanya memaparkan data dan fakta yang telah terjadi, namun juga memberikan analisa mengenai alasan upaya tersebut gagal. Melalui analisa tersebut, penulis dapat melihat bagaimana dinamika upaya mediasi tidak selalu berhasil, serta penulis dapat menjadikan penelitian ini sebagai acuan bagi penelitian yang sedang dikerjakan. Terdapat kesamaan tema dan masalah antara literatur ini dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu upaya perwujudan damai pada konflik Suriah. Sementara itu, terdapat perbedaan mendasar yang ada di dalam literatur ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, yaitu aktor yang melakukan upaya perwujudan damai. Di dalam literatur ini, Annan dan Brahimi melakukan upaya damai di bawah mandat PBB, sedangkan di dalam penelitian yang akan dilakukan penulis, upaya damai dilakukan oleh Paus Fransiskus yang merupakan kepala negara dari Vatikan, di mana kepala negara akan membawa kepentingan nasional dalam menjalankan kebijakan luar negeri.

¹⁵ Raymond Hinnebusche, *ibid.*

Literatur kedua berasal dari Angeli Francis S. Rivera yang merupakan penelitian bagi *Multidisciplinary Journal of the University of Santo Tomas Graduate School* berjudul *Holy See and International Conflict and Peacekeeping*. Penelitian yang dilakukan oleh Rivera berisi tentang data-data sejarah upaya resolusi konflik yang dilakukan oleh Tahta Suci Vatikan terhadap konflik internasional. Literatur ini diawali oleh penjelasan mengenai ajaran Gereja Katolik yang mendasari kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Tahta Suci. Selanjutnya, Rivera memaparkan upaya yang dilakukan oleh Paus Pius XIII, Paus Yohanes XXIII, Paus Paulus VI, serta Yohanes Paulus II dalam mengatasi permasalahan internasional. Selain memaparkan upaya yang dilakukan, Rivera juga memaparkan tentang bagaimana kondisi politik internasional yang terjadi pada masa kepemimpinan setiap Paus. Dari pemaparan kondisi masalah internasional dan upaya mengatasinya, Rivera juga menyertakan hasil yang diperoleh dari upaya yang dilakukan oleh setiap Paus.¹⁶ Bagi penulis, literatur ini menjadi acuan utama setelah literatur sebelumnya, karena di dalam literatur ini juga memiliki tema dan masalah yang serupa dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, yaitu kontribusi Tahta Suci dalam menyelesaikan permasalahan internasional. Namun tidak seperti literatur sebelumnya, literatur ini tidak menunjukkan kesalahan dalam upaya Tahta Suci saat melakukan resolusi konflik. Pada literatur yang disusun pada tahun 2016 ini pula hanya dijelaskan tindakan Tahta Suci hingga kepemimpinan Paus Yohannes Paulus II, sementara pada tahun

¹⁶ Angeli Francis S. Rivera, *ibid.*

2016 telah terjadi dua kali pergantian Paus, yaitu Paus Benediktus XVI dan Paus Fransiskus.

Literatur ketiga yang menjadi referensi bagi penelitian ini adalah jurnal yang disusun oleh Mariano Barbato yang berjudul *Papal Diplomacy: The Holy See in the World Politics* sebagai bagian dari *World Conference of Political Science 2012*. Di dalam jurnal ini, Barbato menuliskan mengenai peran Tahta Suci Vatikan sebagai negara serta organisasi transnasional di dalam dinamika politik internasional. Barbato menyebutkan bahwa sebagai aktor transnasional, Vatikan memiliki peran yang penting di dalam komunitas internasional melalui diplomasi-diplomasi yang dilakukan. Walaupun merupakan organisasi yang berdasarkan pada agama, Vatikan memisahkan unsur keagamaan dari diplomasi yang dilakukan di dalam komunitas internasional. Barbato menjelaskan secara terperinci unsur-unsur yang dimiliki Vatikan sebagai negara, menunjukkan posisi Vatikan di dalam dunia internasional melalui sejarah panjang negara Vatikan, serta menjelaskan pula arti penting peran Vatikan di dunia internasional saat ini. Literatur ini menjadi referensi bagi penulis untuk melihat peran Tahta Suci Vatikan di dunia internasional melalui diplomasi yang dilakukan.

Penulis berharap dengan ditulisnya penelitian implementasi Evangelii Gaudium dalam Kebijakan Luar Negeri Vatikan pada Konflik Suriah yang akan dilakukan dapat melengkapi laporan yang dibuat oleh Angeli Francis S. Rivera laporan untuk *International Peace Institute*, dan jurnal dari Barbato untuk *World Conference of Political Science*. Melalui pembahasan mengenai rangkaian kebijakan luar negeri yang diambil Vatikan dalam menghadapi konflik Suriah,

diharapkan akan memberi sudut pandang baru untuk melengkapi kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya.

1.12. Kerangka Pemikiran

Hubungan internasional merupakan segala bentuk interaksi antar bangsa, yang dilakukan oleh pemerintah maupun warga negara.¹⁷ Salah satu bentuk hubungan internasional dapat dilihat dari dinamika politik atau kebijakan luar negeri. Interaksi yang ditunjukkan Vatikan sebagai negara di dalam konflik Suriah melalui implementasi kebijakan luar negeri merupakan contoh nyata dari interaksi antar bangsa.

Dalam melakukan penelitian Implementasi Kebijakan Luar Negeri Vatikan terhadap Isu Konflik Suriah, terdapat beberapa teori yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Teori yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah *Neoclassical Realism* oleh Gideon Rose serta teori *International Dimension of Internal Conflict* oleh Michael E. Brown. Selain itu, akan digunakan pula konsep kebijakan luar negeri, konsep *power*, konsep kepentingan nasional, konsep *operational code*.

Di dalam politik internasional terdapat konsep *power* yang digunakan untuk mendeskripsikan hubungan yang muncul antara satu aktor hubungan internasional dengan aktor lainnya yang bertujuan untuk mempengaruhi tindakan aktor lain sesuai dengan keinginannya.¹⁸ Menurut Joseph Nye, *power* dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu *hard power* dan *soft power*. *Hard power* merupakan upaya

¹⁷ K.J. Holsti, 1977, *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis*, Binacipta, hlm 26-27

¹⁸ Richard W. Mansbach & Kirsten L. Rafferty, *Introduction to Global Politics*, Routledge, New York, 2008 hlm 270-275

penggunaan *power* melalui pelaksanaan *coercion* and *rewards*. Aktor yang menggunakan paksaan (*coercion*) dalam melaksanakan *power* mempengaruhi tindakan aktor melalui pemberian ancaman dan/atau pemberian sanksi yang menyebabkan aktor lain tersebut mengalami kesulitan. Sedangkan, aktor yang menggunakan cara pemberian *reward* atau hadiah akan memberikan kemudahan bagi aktor lain agar aktor tersebut melakukan tindakan sesuai dengan keinginan pemberi hadiah. Kapabilitas *hard power* suatu negara biasanya dinilai dari kapabilitas yang berwujud, seperti kekuatan militer, ekonomi, sumber daya alam, populasi, dan geografis.¹⁹

Soft power merupakan upaya untuk mempengaruhi aktor lain menggunakan cara-cara yang menunjukkan kebudayaan dan ideologi dari aktor tersebut. Serupa seperti *soft power*, setiap negara memiliki kapabilitas yang tidak berwujud sebagai penentu kemampuan negara di dalam politik internasional. Beberapa kapabilitas tidak berwujud yang dapat menentukan kemampuan negara adalah kemampuan pemimpin untuk menggunakan sumber daya; pengaruh pemimpin di dalam masyarakat; terdapat intelijen yang menghimpun data; serta kemampuan negara berdiplomasi.²⁰

Konsep Kebijakan Luar Negeri dapat dipahami melalui pengertian dua konsep yang lebih kecil, yaitu konsep kebijakan atau *policy* dan luar negeri atau *foreign*. Kebijakan (*policy*) merupakan seperangkat keputusan atau aksi yang menjadi pedoman untuk bertindak, yang memiliki tujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Kebijakan tersebut merupakan keputusan yang

¹⁹ Richard W. Mansbach & Kirsten L. Rafferty, *ibid.*

²⁰ Richard W. Mansbach & Kirsten L. Rafferty, *ibid.*

diambil dari beberapa pilihan yang tersedia. Sementara itu, konsep luar negeri (*foreign*) dibatasi oleh konsep kedaulatan dan wilayah. Konsep kedaulatan memiliki arti bahwa suatu negara memiliki kontrol akan segala sesuatu yang berada di wilayah negaranya (*domestic*), sehingga segala yang berada di luar kedaulatannya merupakan yang disebut *foreign*.²¹

Politik Luar Negeri atau *Kebijakan luar negeri*, menurut Marijke Breuning, merupakan segala kebijakan yang dikeluarkan suatu negara dalam membentuk sebuah interaksi dengan lingkungan yang berada di luar batas negaranya. Kebijakan tersebut merupakan keputusan yang diambil oleh pemimpin negara dalam menghadapi suatu situasi. Keputusan yang diambil merupakan hasil pemikiran yang paling tepat dari beberapa pilihan dalam menangani masalah tersebut. Dari keputusan yang diambil, muncul tindakan kebijakan luar negeri, yaitu implementasi dari keputusan yang telah diambil. Tindakan kebijakan luar negeri memiliki beberapa tujuan, yaitu tindakan untuk mempengaruhi tindakan aktor lainnya dan tindakan untuk mengamankan kepentingan nasional.²²

Dalam pembuatan kebijakan luar negeri, faktor ide memiliki posisi yang penting. Di dalam Ideas and Foreign Policy disebutkan bahwa ide-ide dapat mempengaruhi kebijakan saat ide-ide dasar tersebut dapat mengarahkan dan memperjelas tindakan aktor terhadap tujuan dari kebijakan tersebut. Suatu ide dapat mempengaruhi kebijakan pula saat ide tersebut mempengaruhi interaksi strategis suatu kelompok untuk memunculkan solusi yang saling menguntungkan,

²¹ Anak Agung Banyu Perwita, 2005, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Remaja Rosdakarya. Hlm 47

²² Marijke Breuning. 2007. *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction*. England: Palgrave Macmilan. Hlm: 5-8

menjadi perekat bagi dua kelompok yang terpecah, serta menjadi fokus utama dalam mencari solusi dalam suatu kerjasama. Selain itu, ide juga dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan saat ide-ide tersebut diinstitutionalisasi menjadi seperangkat norma ataupun aturan. Di dalam konteks ini, ide yang dimaksudkan adalah keyakinan yang dimiliki oleh pemimpin politik di dalam kelompok sosialnya.

Terdapat tiga tipe ide atau kepercayaan yang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri, yaitu

- a. World views: ide-ide besar yang menjadi simbol budaya suatu kelompok*
- b. Principled beliefs: ide-ide normative yang menentukan tindakan yang benar dan tindakan yang salah*
- c. Causal beliefs: ide atau kepercayaan yang muncul dari hubungan sebab-akibat yang dinyatakan oleh pemimpin yang berwenang.*

Pembuatan kebijakan luar negeri memiliki tujuan tersendiri. Pada dasarnya, tujuan kebijakan luar negeri secara jangka panjang adalah untuk mencapai perdamaian, keamanan, dan kekuasaan. Tujuan dari kebijakan luar negeri seringkali berorientasi atau disamakan dengan kepentingan nasional. Menurut Plato, kebijakan luar negeri dirancang untuk menjangkau tujuan nasional, dengan mempertimbangkan kondisi politik internasional serta *power* yang dimiliki oleh negara dan sejalan dengan kepentingan nasional.²³

²³ Anak Agung Banyu Perwita, *ibid.* hlm 51

Kepentingan nasional merupakan gambaran mengenai keadaan negara pada masa mendatang dengan memperluas pengaruh ke luar batas negara²⁴. Terdapat 3 jenis kepentingan nasional, yaitu kepentingan inti atau *core interests*, tujuan-antara dan tujuan jangka panjang²⁵. Kepentingan inti atau *core interests* merupakan kepentingan yang memiliki nilai yang sangat tinggi hingga negara bersedia untuk melakukan pengorbanan demi memperjuangkan kepentingan tersebut, seperti melakukan perang. Kepentingan ini seringkali berkaitan dengan eksistensi dan kedaulatan negara yang bersangkutan dan bersifat jangka pendek.

Tujuan-antara merupakan kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh setiap negara namun tidak sertamerta menggunakan cara militer dalam memperjuangkan kepentingannya. Tujuan-antara meliputi upaya pemerintah memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakatnya, seperti permasalahan tenaga kerja, perdagangan, isu etnis, dan lainnya.

Tujuan jangka panjang merupakan rencana, cita-cita dan pandangan suatu negara terhadap sistem internasional. Tujuan ini biasanya dilakukan melalui pembuatan tuntutan universal, seperti pembuatan kesepakatan internasional tentang suatu isu. Penetapan tujuan jangka panjang ini tidak disertai dengan penentuan tindakan yang harus dilakukan negara untuk mencapainya.

Untuk dapat memahami proses, tujuan dan dampak yang ditimbulkan dari dilakukannya kebijakan luar negeri suatu negara terhadap negara lain, dilakukan studi analisa kebijakan luar negeri. Menurut Chris Alden dan Amnon Aran, analisa kebijakan luar negeri merupakan sebuah studi mengenai pelaksanaan

²⁴ K.J. Holsti, 1977, Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis, Binacipta, hlm 176-195

²⁵ Anak Agung Banyu Perwita, ibid. hlm 52

hubungan antar aktor yang berbeda, terutama negara, di dalam sistem internasional. Analisa kebijakan luar negeri tidak hanya berfokus pada aktor formal pada level negara yang berkontribusi pada pembuatan kebijakan, namun juga memiliki fokus pada kondisi pada level sub-negara yang mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri²⁶. Tujuan dari dilakukannya analisa kebijakan luar negeri adalah untuk melihat bagaimana nilai-nilai yang dipercaya oleh pembuat kebijakan mempengaruhi kebijakan luar negeri. Analisa kebijakan luar negeri juga melihat bagaimana suatu kebijakan yang dibuat merupakan representasi dari kebutuhan dan nilai masyarakat bangsa tersebut²⁷.

Dalam melaksanakan kebijakan luar negeri, tindakan negara dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Kategori tindakan negara adalah sebagai berikut²⁸;

- *Inaction*; negara tidak bertindak;
- *Supportive action*; negara mendukung tindakan aktor lain;
- *Oppositional action*; negara melawan tindakan aktor lain;
- *Neutral action*; aktor berusaha menghentikan tindakan aktor lain dengan cara penghentian pengalihan sumber daya agar suatu kasus dapat diselesaikan;
- *Inducing action*; upaya membujuk agar aktor yang menjadi sasaran melakukan sesuatu dan tidak melakukan sebaliknya;

²⁶ Chris Alden & Amnon Aran, *Foreign Policy Analysis: New Approaches*, Routledge, 2012 hlm 3

²⁷ Chris Alden, *Ibid.* hlm 90

²⁸ Howard Lentner, *ibid.*

- *Self-assertion*; sikap tertentu yang ditunjukkan negara untuk menunjukkan diri sebagai sebuah kekuatan;
- *Isolation*; negara mengisolasi negara lain;
- *Eccentricity*; pemimpin negara yang menonjol.

Setiap negara memiliki cara-cara tersendiri untuk dapat menjalankan kebijakan luar negerinya. Menurut K.J. Holsti, terdapat empat jenis instrumen yang dapat dilakukan negara untuk menjalankan kebijakan luar negeri, yaitu instrumen diplomasi, propaganda, ekonomi, dan militer.

Diplomasi merupakan instrumen yang digunakan untuk berkomunikasi dengan target kebijakan luar negeri suatu negara, seperti menerangkan tujuan kebijakan luar negeri serta berusaha membujuk negara lain untuk menyesuaikan kebijakan mereka agar selaras dengan sasaran yang telah disiapkan. Penggunaan instrumen diplomasi dapat dinilai berhasil bila mampu mempengaruhi tindakan pemerintah negara lain dengan cara yang sesuai dengan kepentingan nasional.²⁹

Instrumen selanjutnya adalah melalui propaganda. Propaganda merupakan usaha pemerintah melalui diplomat dan/atau propagandis mempengaruhi sikap dan perilaku rakyat, terutama kelompok rakyat tertentu. Tujuan penggunaan propaganda adalah agar tindakan kelompok atau masyarakat dapat mempengaruhi sikap dan tindakan pemerintah³⁰

Negara juga dapat melaksanakan kebijakan luar negeri melalui bidang ekonomi. Penggunaan instrumen ini memiliki konteks segala bentuk perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah yang memiliki tujuan politik dengan

²⁹ K.J. Holsti, *ibid.* hlm 223-225

³⁰ K.J. Holsti, *ibid.* hlm 267-273

memanipulasi kegiatan tersebut. Tujuan penggunaan instrumen ini adalah mencapai sasaran politik luar negeri dengan mengeksploitasi kebutuhan dan ketergantungan ekonomi dan mengajukan imbalan ekonomi atau melakukan ancaman atau menerapkan sanksi; meningkatkan kapabilitas negara atau meniadakan potensi kapabilitas negara lawan; menciptakan satelit ekonomi; jaminan pemasaran dan sumber persediaan, membantu mempertahankan ketaatan politik negara satelit, atau menciptakan ruang pengaruh.³¹

Instrumen terakhir yang dapat digunakan negara untuk menjalankan kebijakan luar negeri adalah melalui kapabilitas militer. Melalui kekuatan militer, pemerintah negara berupaya mempengaruhi dan mengeksploitasi negara lain atau menyelesaikan krisis domestik dalam sistem politik yang tidak stabil melalui intervensi militer, tindakan politik terselubung, subversi, dan perang gerilya.³²

Selain menggunakan teori *Neoclassical Realism*, untuk dapat lebih memahami konflik yang terjadi di Suriah akan digunakan teori Konflik menurut Michael E. Brown. Konflik internal merupakan segala bentuk kekerasan atau potensi kekerasan dalam permasalahan politik, dimana sumber konflik berasal dari faktor-faktor domestik, serta terjadinya kekerasan di dalam teritori suatu negara³³. Setiap negara memiliki faktor-faktor umum penyebab konflik. Namun faktor-faktor ini tidak secara langsung menyebabkan konflik internal terjadi. Terdapat faktor-faktor pemicu yang menyebabkan tersulutnya konflik internal dalam suatu negara.

³¹ K.J. Holsti, *ibid.* hlm 300-303

³² K.J. Holsti, *ibid.* hlm 385-387

³³ Michael E Brown, *International Dimension of Internal Conflict*, MIT Press, 1996, hlm 1

Konflik internal yang terjadi dalam jangka waktu yang lama akan dapat berkembang menjadi konflik regional, bahkan hingga menjadi konflik berskala internasional. Brown juga memaparkan arti penting 5 konflik internal dalam politik internasional³⁴, yaitu penyebaran konflik; menyebabkan penderitaan; berdampak pada negara tetangga; mengundang masuknya kekuatan besar ke dalam konflik internal; dan upaya perdamaian dunia.

- Penyebaran konflik; terjadinya peningkatan tren konflik internal di dalam politik internasional. Penyelesaian konflik internal dinilai lebih sulit dibandingkan dengan konflik antar-negara karena hubungan antar-negara telah diatur sehingga tindakan setiap negara terhadap negara lain sangat teratur. Sementara, konflik internal negara menjadi tanggung jawab masing-masing pemerintahan.
- Menyebabkan penderitaan; konflik internal menyebabkan munculnya penderitaan yang sangat mendalam akibat tindakan-tindakan yang terjadi dalam konflik tersebut seperti pembunuhan, intimidasi, pemerkosaan, serta pengusiran secara paksa.
- Berdampak pada negara tetangga; konflik internal yang berlarut-larut dapat menyebabkan dampak bagi negara lain, terutama negara yang bertetangga, diantaranya adalah memunculkan pengungsi. Pengungsi yang mencari suaka ke negara lain dapat memunculkan masalah ekonomi dan keamanan di negara yang disinggahi. Seringkali banyak pula pengungsi yang tidak ingin kembali ke negaranya setelah konflik selesai. Konflik

³⁴ Michael E Brown, Ibid hlm 3-9

internal juga dapat menyebabkan munculnya diaspora konflik, yaitu saat sekelompok orang yang berkonflik meninggalkan tempat konflik untuk menyusun strategi penyerangan balik.

- Mengundang masuknya kekuatan besar ke dalam konflik internal; terdapat kekuatan-kekuatan besar dari dunia internasional, baik negara-negara besar maupun organisasi internasional seperti PBB yang masuk ke dalam konflik internal untuk melakukan intervensi kemanusiaan.
- Upaya perdamaian dunia; konflik internal yang berlarut-larut dan dinilai tidak mudah untuk diselesaikan akan mengundang terjadinya upaya perwujudan perdamaian dunia melalui resolusi konflik.

1.13. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.13.1. Metode Penelitian

Penelitian implementasi *Evangelii Gaudium* dalam Kebijakan Luar Negeri Tahta Suci Vatikan pada Konflik Suriah akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam metode kualitatif, penelitian akan memiliki sifat mengamati kasus, mengumpulkan data serta menganalisa data yang berupa kasus. Melalui metode kualitatif, penelitian akan mendalami suatu realitas yang menjadi masalah penelitian.³⁵ Penelitian ini akan menggunakan jenis penulisan deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang situasi dan kondisi secara terperinci melalui kondisi sosial dan hubungan-hubungan yang terjadi.³⁶

³⁵ Rully Indrawan & Poppy Yaniawati, 2014, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*, Refika Aditama, hlm 65-72

³⁶ W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, (Harlow: Pearson Education Limited, 2014): hlm 38

1.13.2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian implementasi *Evangelii Gaudium* dalam Kebijakan Luar Negeri Tahta Suci Vatikan pada konflik Suriah akan menggunakan teknik pengumpulan data melalui kajian pustaka dengan sumber-sumber data sekunder. Data sekunder yang akan digunakan penulis di dalam penelitian ini berasal dari media resmi yang dimiliki oleh pemerintah Vatikan untuk mempublikasikan seluruh kegiatan yang dilakukan Tahta Suci, seperti surat, pesan verbal, kegiatan kunjungan kenegaraan, hingga notulesi kotbah Paus. Media tersebut berupa situs web yang disebut sebagai *Vatican Archive*. Selain itu, penulis akan mengambil dari surat kabar elektronik, buku biografi, serta jurnal sebagai data sekunder.

1.14. Sistematika Penelitian

Penelitian implementasi *Evangelii Gaudium* dalam Kebijakan Luar Negeri Tahta Suci Vatikan pada konflik Suriah akan dijelaskan dalam 5 bab, yaitu dari Bab I hingga Bab V.

Bab I sebagai Pendahuluan akan, memaparkan latar belakang historis konflik Suriah serta menjabarkan latar belakang negara Vatikan dan peran Vatikan sebagai negara di dalam dinamika politik global sebagai permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini. Lebih lanjut, pada Bab I akan dibahas mengenai kegunaan dan tujuan penelitian, kajian literatur, serta metode penelitian.

Bab II akan menjabarkan konflik Suriah yang berawal dari konflik internal hingga menjadi masalah internasional dan mengapa konflik Suriah perlu disorot oleh dunia internasional

Bab III akan mendeskripsikan kondisi umum Vatikan serta kebijakan dan kepentingan Vatikan sebagai negara di dalam politik global secara umum dan dalam regional Timur Tengah secara khusus.

Bab IV akan menjabarkan tentang kebijakan luar negeri Tahta Suci Vatikan yang berlandaskan nilai-nilai di dalam *Evangelii Gaudium* yang telah diambil oleh Vatikan dalam menghadapi isu konflik Suriah dalam masa kepemimpinan Paus Fransiskus.

Bab V akan berisi kesimpulan dari hasil analisa penelitian implementasi *Evangelii Gaudium* dalam kebijakan luar negeri Tahta Suci Vatikan pada konflik Suriah.